



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Berkaitan dengan hal diatas, dalam skripsi terdahulu yang dibuat oleh Kirana Noviandini (2009) dengan judul “Naturalisme dalam Lirik-lirik Lagu Jepang Populer Melalui Istilah Sakura” dari Universitas Indonesia, Depok. Didalamnya memaparkan mengenai penelitian untuk mengetahui makna yang terdapat pada lirik lirik lagu populer Jepang melalui penggunaan istilah sakura. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan Nakamura Hajime, dalam bukunya yang berjudul *Nihonjin no Shiihoho*. Metode yang digunakan oleh Kirana Noviandini adalah metode deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang jepang, sekarang ini masih menanamkan sifat naturalis, tersermin dalam lirik-lirik jepang populer.

Skripsi selanjutnya, berasal dari David Manduggan (2009), yang berjudul, “Resistensi dan Perlawanan Masyarakat Patani Terhadap Politik Integrasi Nasional Thailand”. Skripsi yang berasal dari Universitas Indonesia ini berusaha untuk memaparkan resistensi masyarakat patani di Thailand terhadap konstruksi identitas nasional Thailand. Fokus dari skripsi ini adalah bagaimana konstruksi identitas menjadi hal yang resisten. Skripsi ini menggunakan teori identitas Castells yang menjelaskan secara deskriptif-analisis opresi *Legitimizing Identity*, yang diwakili masyarakat Patani. Hasil

penelitian membuktikan jika usaha integrasi pemerintah Thailand menimbulkan resistensi dan perlawanan masyarakat patani.

Peneliti	Kirana Noviandini Ilmu Budaya Universitas Indonesia	David Manduggan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Judul Penelitian	Naturalisme dalam Lirik-lirik Lagu Jepang Populer Melalui Istilah Sakura	Resistensi dan Perlawanan Masyarakat Patani Terhadap Politik Integrasi Nasional Thailand
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
Hasil	Kirana mampu menemukan makna naturalisme dalam lagu-lagu populer Jepang dengan menggunakan metode Nakamura Hajime dalam bukunya yang berjudul <i>Nihonjin no Shiihoho</i> .	David mampu membuktikan bahwa integrasi yang dilakukan pemerintah Thailand dapat menimbulkan resistensi dan perlawanan masyarakat patani.
Perbedaan Dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan penelitian Kirana adalah metode yang digunakan, dan objeknya, Kirana menggunakan metode Nakamura Hajime untuk memperlihatkan hubungan tanda dan makna	Perbedaan dengan penelitian David adalah metode yang digunakan. Saat David menggunakan metode deskriptif- analisis untuk memaparkan resistensi masyarakat patani.

## 2.2. SEMIOTIKA

Semiotika disebut sebagai ilmu tentang tanda (Noth, 1990: 3). Menurut Wibowo (2013), semiotika yang didefinisikan sebagai kajian tentang tanda-tanda, pada dasarnya merupakan studi atas kode-kode yakni sistem apapun yang memungkinkan kita memandang unit tertentu sebagai objek yang bermakna (2013: 9).

Dalam buku Winfried Noth yang berjudul *Handbook of Semiotics* (1990), ide semiotika sebagai ilmu yang menganalisis makna dan tanda, pertama kali keluar pada zaman pertengahan. Zaman tersebut dijadikan permulaan ilmu semiotika modern yang nanti akan dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce.

Menurut Todorov (dalam Noth, 1990: 11), akar semiotika modern pertama kali berasal dari tradisi barat, semantik, logika, retorika, dan hermeneutika.

Menurut Wibowo dalam bukunya, *SEMIOTIKA: Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Penelitian Skripsi Ilmu Komunikasi* (2013: 5), dia menulis:

Kajian semiotika pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam tiga penyelidikan, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik;

1. Sintaktik (*syntaxis*): suatu cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji “hubungan formal diantara satu tanda dengan tanda lainnya”.

Dengan begitu hubungan formal ini merupakan kaidah-kaidah yang

mengendalikan tuturan dan interpretasi, pengertian sintaktik kurang lebih adalah semacam ‘gramatika’.

2. Semantik: suatu cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari “hubungan diantara tanda-tanda dengan designata atau objek-objek yang diacunya”. Yang dimaksud designata adalah tanda-tanda sebelum digunakan dalam tuturan tertentu.
3. Pragmatik: suatu cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan diantara tanda-tanda dengan *interpreter* atau pemakainya.

Untuk mengidentifikasi struktur medianya, *semiotician* dibekali oleh tiga pertanyaan dasar, yaitu:

1. Apa yang membuat struktur tertentu itu memiliki arti?
2. Bagaimana hal tersebut merepresentasikan artinya?
3. Mengapa makna tersebut adalah arti dari itu (Danesi, 2002: 23)?

Semiotika masuk dalam studi dimana kita tidak menyebut tanda dalam setiap perbincangan setiap hari, tetapi apa yang keluar dengan maksud dibaliknya. Dalam indra semiotika, tanda tersebut bisa muncul dari kata-kata, gambar, suara, gestur, dan objek (Chandler, 2002: 2).

Dalam semiotik, konsep kode akan menjadi penting, Roman Jakobson menjelaskan bahwa produksi dan interpretasi dari teks akan bergantung pada kode mengenai terbentuknya komunikasi tersebut (Jakobson dalam Chandler, 2002: 147).

Kode mengorganisir tanda menjadi sistem yang bermakna dengan mengorelasikan antara *signifier* dan *signified* melalui bentuk struktural dari *syntagms* dan paradigma-paradigma (Chandler, 2002: 147).

## 2.3. KONSEP YANG DIGUNAKAN

### 2.3.1 Representasi

Menurut Hockett, representasi bisa diartikan sebagai hubungan antara penanda mental dengan referensi objek (ide yang merepresentasikan sesuatu) dan penanda mental dengan ucapan sebenarnya (makna dari kata yang merepresentasikan ucapan dari kata). Sedangkan signifikansi menurut Hockett, adalah hubungan antara kata dengan arti dan referensi (tanda dan makna) (dalam Noth, 1990: 94).

Menurut Bunge, representasi adalah konsep yang merekonstruksikan tentang kebenaran dari suatu objek. Bunge menggambarkan perbedaan mendasar antara representasi dengan referensi; saat referensi berhubungan dengan sesuatu yang membentuk secara keseluruhan, sedangkan representasi mengacu pada pembentukan sesuatu berdasarkan aspek-aspeknya, tetapi keduanya saling berkaitan (Bunge dalam Noth, 1990: 95).

Representasi lebih terfokus pada hubungan tanda dan makna, konsepnya sendiripun bisa berubah-rubah. Menurut Nuraini Juliastuti, representasi berubah akibat makna yang ikut berubah, maka dari itu representasi merupakan proses dinamis yang berkembang terus seiring dengan perkembangan kemampuan peneliti (Wibowo, 2013: 148).

Menurut Marcel Danesi dalam bukunya, “*Understanding Media Semiotics*”, dia mengartikan representasi sebagai, “proses dalam merekam ide, pengetahuan, dan pesan melalui bentuk fisik. Hal tersebut bisa didefinisikan sebagai ilmu dalam menggunakan tanda (gambar, musik, dll.) untuk dihubungkan, digambarkan, atau direproduksi menjadi sesuatu yang bisa diterima, dirasakan, diimajinasikan, atau dirasakan dalam bentuk fisik (2002: 3). Dalam semiotika, bentuk fisik akan selalu menjadi representasi, X yang dikenal sebagai penanda, dan Y, yang dikenal sebagai petanda, adalah salah satu makna yang bisa ditarik dari representasi ( $X=Y$ ), atau yang sering disebut signifikansi.

Greimas melanjutkan, terdapat perbedaan yang jelas diantara signifikansi dan pemaknaan. Menurut Greimas dan Courtes, signifikansi adalah *key concept* dalam semua teori semiotika. Signifikansi didefinisikan sebagai “artikulasi makna”, hal tersebut mengandung aspek dinamis dan statis. Jika sebelumnya adalah “proses dalam memproduksi makna”, selanjutnya adalah “makna yang telah diproduksi”. Dalam semiotika neo-Hjemslevian Greimas’s, signifikansi merupakan transformasi dari sebuah makna (Noth, 1990: 95).

Sedangkan pemaknaan masih menurut Greimas dan Courtes, tidak bisa terlalu “didefinisikan”. Pemaknaan hanya berlaku sebagai efek makna yang diproduksi oleh indra kita yang bersentuhan dengan pemaknaan itu sendiri (Noth, 1990: 95).

### **2.3.1 Musik**

Musik diambil dari bahasa Yunani, yaitu *mousike*, yang berarti seni dari Muses. Musik adalah seni yang memakai medium dari suara. Elemen-elemen penting dalam musik adalah tangga nada, ritme, *dynamics*, dan kualitas suara melalui timbre dan tekstur.

Dalam pembuatannya, pertunjukan, signifikansi, dan segala hal yang berkaitan memunculkan definisi yang luas dari musik itu sendiri, merujuk pada budaya dan konteks sosialnya. Musik terdapat secara luas, dalam komposisi yang jelas, sampai pada fase improvisasi ke bentuk *aleatoric*.

Musik populer sering disebut sebagai musik dari kehidupan kita; kita bisa mendengarnya di radio, didalam pemutar CD, kaset di *walkman*, ada di toko musik, masuk ke dalam iklan-iklan, sampai pada *soundtrack* film yang mengeluarkan *mood* dan *feeling* kita. Musik ini juga menjadi perhatian media, mereka ditulis, dikritisi, dan didalami perkembangannya. Melihat hubungannya, antara musik dengan industri, dan konsumennya, itulah yang membentuk budaya musik populer (Wall, 2003: 1).

### **2.3.2 Musik Sebagai Komunikasi Massa**

Menurut Joseph Turow dalam *MEDIA TODAY: An Introduction To Mass Communication* (2009: 12), komunikasi massa memiliki kesamaan dengan bentuk komunikasi lainnya, perbedaannya hanya terletak pada mediumnya.

Komunikasi massa memiliki ruang lingkup lebih luas dari bentuk komunikasi lainnya. Contohnya secara sumber, jika dalam model komunikasi biasa, sumber merupakan perorangan atau individu, dalam komunikasi massa, sumber bisa berupa perusahaan atau kolektif yang kompleks (Turow, 2009: 12).

Maka dari itu, menurut Turow (2009: 17), komunikasi massa bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang telah terindustrialisasi secara produksi, dan didistribusikan secara berkali-kali melalui perangkat berteknologi.

Maka secara prosesnya, musik sebagai budaya populer juga masuk dalam ranah komunikasi massa. Musik masuk sebagai media massa, karena dalam produksinya melibatkan teknologi dan disebarluaskan secara berkala.

### 2.3.3 Hip-Hop

Hip-Hop adalah bentuk dari musik populer yang terdiri dari MC dan DJ. Dua komponen lainnya, *graffiti* dan *breakdance* juga dijadikan elemen dari hip-hop. Setelah hip-hop berubah menjadi industri yang besar, keempat elemen tersebut melebur dengan subjek-subjek lainnya, seperti desain kaos, bahasa gaul, dan pola pemikiran (rap.about.com, diunduh pada 24 Juni 2014).

Pada tahun 1925, Earl Tucker A.K.A Snake Hips, menjadi seorang *performer* yang menemukan gaya tarian yang sama, dengan gaya tarian hip-hop dewasa ini. Dia memasukan unsur *float* dan *slides* kedalam gayanya,

nantinya gaya tersebut akan menginspirasi salah satu elemen dari hip-hop yaitu *breakdancing*.

Hip-hop di Amerika selalu dihubung-hubungkan dengan *ghetto personality*, tentu saja untuk mencapai kesuksesan, para musisi hip-hop ini banyak memakai cerita masa lalunya yang kelam sebagai batu loncatan. 50 Cent, seorang musisi hip-hop yang masuk skena tersebut pada tahun 2003, mempunyai masa lalu yang kelam. Dia adalah seorang bandar narkoba, dia mempunyai kenangan tentang kematian ibunya yang kecanduan *shabu*, sampai pada selamatnya dia secara ajaib dari sembilan peluru yang bisa saja merenggut nyawanya, menjadikan 50 Cent sebagai musisi hip-hop yang memiliki pengaruh penting dalam industri hip-hop, kredibilitas jalanan (Watkins, 2005: 2).

Tidak hanya dihubungkan dengan kehidupan *ghetto*, hip-hop juga menjadi medium politis bagi para penggunanya. Pada medio 1970-an hip-hop memang menjadi bagian dari budaya *underworld*, saat itu Amerika dikejutkan dengan pembaharuan kota, segregasi, dan peraturan-peraturan sosial dan ekonomi (Watkins, 2005: 9).

Hip-hop yang juga saat itu dianggap sebagai sebuah pergerakan mulai berubah menjadi industri budaya, keterkaitannya dengan unsur-unsur komersil dan divisi politik masa kini memunculkan keraguan dalam term pergerakannya (Watkins, 2005: 10).

#### **2.3.4 Perlawanan Sipil**

Konsep perlawanan sipil di dunia selalu mengingatkan kita dengan nama-nama besar, salah satunya adalah Mahatma Gandhi dan Martin Luther King. Mereka berdua memiliki kesamaan pandangan tentang kampanye perlawanan sipil, yaitu komitmen besar untuk menghindar dari bentuk-bentuk kekerasan (Roberts, 2009: 13).

Munculnya perlawanan sipil selalu dikaitkan dengan sebab-musababnya, perlawanan sipil tidak akan muncul, jika tidak ada yang memicu. Sejarah mencatat, mulai Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Kenneth Kaunda, Va'clav Havel, Aung San Suu Kyi, dan Adolfo Perez Esquivel, mereka adalah figur-figur kunci yang bangkit dan melawan karena adanya ketidakadilan.

Mahatma Gandhi, yang mengawali gerakan perlawanan India pada 1917, menjadi tonggak akan bentuk perlawanan sipil yang berhasil, hingga dijadikan contoh praktis dan ideologis oleh seluruh dunia. Berawal dari pendudukan imperial Inggris, Gandhi yang baru saja kembali dari Afrika Selatan pada 1915, telah membentuk keyakinan jika metode *non-violent* bisa digunakan untuk melawan segala bentuk kejahatan, *truthforce* atau *satyagraha* menjadi sangat kental dengan perlawanan pasifnya (*non-violent*) hingga dipraktikkan dimana-mana (Ash, 2009: 43-44).

Menurut Adam Roberts dalam buku *Civil Resistance & Power Politics* (2009), perlawanan sipil yang muncul dalam berbagai bentuk melalui sejarah, telah menjadi dekat selama beratus-ratus tahun belakangan ini, tiga hal besar

yang bisa memicunya – dekolonisasi, demokratisasi, dan persamaan rasial – menyebabkan kampanye-kampanye perlawanan sipil, dikarakterisasikan sebagai kegiatan yang menggunakan aksi tanpa kekerasan.

Salah satu pendekatan untuk mengerti perlawanan sipil telah dilihat sebagai alternatif dari politik kekuasaan. Inti dari metode *non-violent* adalah mengganti aksi kekerasan dalam banyak aspek, pendekatannya ditemukan dalam tiga tradisi tentang bagaimana perlawanan sipil berhubungan dengan *power politics*; pasifis, *progressive substitution*, dan pertahanan tentang perlawanan sipil (Ash, 2009: 7).

Pasifisme, yang bisa didefinisikan sebagai penolakan tentang ketergantungan terhadap angkatan bersenjata, dikhususkan dalam bidang politik dan hubungan internasional. Pasifisme lebih dimengerti sebagai bagian dari sistem kepercayaan individual atau yang sering disebut pasifis.

Sedangkan *progressive substitution* adalah melihat aksi kekerasan dipandang perlu, dalam perlawanan sipil, sepanjang memiliki fungsi penting dalam masyarakat. Dalam hal ini, perlawanan sipil perlu untuk dikembangkan secara mantap dan taktis untuk menggantikan fungsi yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata.

Tradisi yang ketiga adalah munculnya ide tentang pertahanan dari perlawanan sipil, atau yang sering disebut ‘*civilian defence*’ atau ‘*civilian-based defence*’. Hal tersebut bisa didefinisikan sebagai kebijakan yang terkoordinasi untuk mempertahankan masyarakat dari ancaman internal, seperti kudeta dan ancaman luar, macam pendudukan, blokade, dan

pemboman, dengan mempersiapkan kampanye perlawanan sipil yang intensif (Ash, 2009: 10).

Hal itulah yang menyebabkan aksi perlawanan sipil selalu bisa ditemukan dalam setiap bingkai sejarah, perlawanan sipil memang selalu digunakan sebagai bentuk dari perjuangan di masa modern. Seperti melawan kolonialisme, pendudukan masyarakat luar, kudeta militer, rezim diktator, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, isu rasial, agama, dan diskriminasi gender (Ash, 2009: 2).

Tetapi patut disayangkan jika perlawanan sipil yang bersejarah, semuanya tidak bermuara pada keberhasilan. Contohnya dalam *Moment of The Monks*, Christina Fink (dalam Ash, 2009: 360) menuliskan jika dalam peristiwa tersebut, para biksu dan masyarakat yang melawan, gagal mendapatkan tujuan mereka, yang disebutnya sebagai “kegagalan jangka-pendek”. Menurut Fink, kegagalan demonstrasi tersebut disebabkan oleh strategi perencanaan yang tidak memadai, kurangnya perhatian internasional, dan rezimnya yang terlalu kuat. Menurut Gene Sharp, demonstrasi 2007 tersebut tidak dapat meruntuhkan pilar-pilar yang mendukung keberadaan rezim (Ash, 2009: 361).

Perjuangan *intifada* juga menemui kegagalan yang sama, dari *first intifada* yang dilakukan pada 1988 sampai 1993, berlanjut ke *second intifada* pada 2001 sampai 2005, pendudukan Israel tetap dilakukan dan Palestina terus digerogoti, sampai sekarang.

Dilansir oleh CNN.com pada 25 Mei 2014, Paus Francis akan memediasi Israel yang diwakili Presiden Shimon Peres, dan Palestina yang diwakili oleh Presiden Mahmoud Abbas, untuk membicarakan kesepakatan damai di Vatikan. Keduanya memang telah memberikan sinyalemen positif, Palestina melalui Mahmoud Abbas telah menerima undangan tersebut, dan akan berangkat ke Vatikan, sedangkan otoritas Israel mengatakan, “akan selalu mendukung, dan terus mendukung, agar usaha-usaha perdamaian bisa tercapai” (edition.cnn.com, diunduh 26 Mei 2014).

Walaupun ada perlawanan sipil yang belum berhasil, sejarah juga mencatat ada perlawanan sipil yang berhasil. Genoa pada 23-25 April 1945, berhasil dibebaskan dari pasukan NAZI Jerman, Genoa merupakan satu-satunya peristiwa pada Perang Dunia Kedua dimana semua tentara telah menyerah kepada partisan (guidadigenova.it, diunduh pada 25 Juni 2014).

Karena aktivitasnya yang sangat menentang fasis, Genoa dianugerahi medali emas karena aksi resistensinya, aksi resistansi itu sendiri dibentuk oleh fenomena anti-fasisme yang muncul karena pendudukan NAZI di daratan Eropa.

Kemunculan CLN atau National Liberation Committee juga menjadi awal atas munculnya aksi resistensi di Italia, karena banyak berisikan unit-unit oposisi dan pandangan politik beragam (komunis, *shareholder*, monarki, sosialis, katolik, dan anarkis), CLN menulis konstitusi yang sesuai dengan tradisi politik mereka yang terinspirasi oleh prinsip demokrasi dan anti-fasisme (desertwar.net, diunduh pada 25 Juni 2014).

Di era modern ini aksi perlawanan sipil juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dalam aksi perlawanan sipil April 6th Youth Movement di Mesir pada 2014, masyarakat mengembangkan pola resistensi yang lebih terorganisir dan penuh dengan teknologi.

*Irevolution.net* mengungkapkan jika Ahmad Salah, *co-founder* dari aksi resistensi tersebut dalam *twitter*-nya mengajarkan para masyarakat dalam memobilisasi demonstrasi (*irevolution.net*, diunduh pada 2 Juli 2014).

Gambar 1: Kicauan Ahmad Salah dalam akun *twitter*-nya

**"we had to start in the alleys, yelling & screaming as loud as possible. when numbers grew, we would go to larger streets." - #egyptAYM**

8:15 AM Feb 26th via Echofon



(Sumber: <http://irevolution.net/2011/02/27/tactics-egypt-revolution-jan25/>)

Kicauan tersebut secara jelas menyebutkan kepada para masyarakat Mesir untuk turun ke jalan, berteriak sekerasnya. Lalu saat massa sudah bertambah banyak, masyarakat harus pergi ke jalan yang lebih besar.

Para aktivis Mesir juga menyebarkan pamflet berbahasa arab yang berjudul “How To Protest Intelligently”. Pamflet ini mengajarkan masyarakat untuk melakukan aksi resistensi dengan lebih rapi dan terorganisir (theatlantic.com, diunduh pada 2 Juli 2014).

Gambar 2: Contoh selebaran yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris



(Sumber: <http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/01/egyptian-activists-action-plan-translated/70388/>)

Pamflet dengan total 26 halaman berjudul “How To Protest Intelligently” ini disebarluaskan melalui *e-mail* untuk dicetak dan disebarluaskan ke masyarakat luas. Para aktivis memilih untuk tidak menggunakan sosial media

semacam *twitter* dan *facebook* karena kedua media tersebut telah diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri Mesir.

### **2.3.5 Perlawanann Sipil di Indonesia**

Krisis ekonomi yang pada akhirnya dapat menurunkan Soeharto dan orde barunya, menjadi salah satu kejadian politik paling besar di Asia Tenggara dalam 30 tahun terakhir, lebih besar dibandingkan kejadian pada tahun 1965. Jatuhnya Soekarno dan ditinggalkan kebijakan konfrontasinya terhadap Malaysia, juga munculnya kekuatan dari barat setelah terjadinya kudeta 1965, menghasilkan orde baru di Asia Tenggara (Rabasa, 2001: 9).

Merujuk pada selebaran yang didistribusikan Komite Perjuangan Rakyat pada awal 1998, yang mengatakan jika, “untuk ABRI, hanya ada dua pilihan, berdiri didepan Soeharto dan menyerang rakyat yang meminta penurunan harga dan penggulingan Soeharto, atau berdiri dibelakang masyarakat, yang tumbuh makin kuat dan besar, dengan konsekuensi untuk menerima kontrol dari masyarakat. Karena masyarakat adalah segalanya. Suara masyarakat adalah suara Tuhan. Jatuhkan tiran dan rezim arogan adalah hal yang benar bagi para masyarakat loyal. Masyarakat yang bersatu tidak bisa dikalahkan!!!”<sup>1</sup>

Pada 1998, demonstran indonesia menandakan pemisahan dengan jelas, dimana kebijakan negara terpisah dan terfragmentasi melalui pergerakan oposisi. Kebanyakan demonstran adalah pelajar, karena pelajar memegang

---

<sup>1</sup> Leaflet distributed by Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (People's Struggle Committee for Change), Yogyakarta, early May 1998

peranan penting dalam pergerakan anti pemerintah di negara berkembang (Aspinall, 2005: 117). Pelajar membentuk oposisi universal; mereka mengoposisi rezim apapun yang ada dalam masyarakat. Para teoris politik telah melihat jika para pelajar memiliki kemauan yang kuat untuk memprotes, terkait dengan berbagai faktor, termasuk kebebasan mereka terhadap konservatif nya orang dewasa, kemampuan mereka untuk mempelajari hal baru, dan pemusatan mereka dalam pusat kota (Samuel Huntington dalam Aspinall, 2005: 117).

Walaupun gerakan demonstrasi sudah dilakukan secara berkelanjutan, “keterbukaan” di tahun 1980 menjadi tonggak dari pergerakan ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya front-front penting, melonggaranya pembatasan dalam aktivitas berpolitik, sampai pada institusi aktivis seperti aksi mahasiswa sampai pada persatuan buruh independen mulai bangkit. Awal 1990-an, kemampuan rezim untuk menekan organisasi politik mulai melonggar, beberapa aksi-aksi perjuangan yang mengedepankan lokalitas mulai bermunculan, sebut saja kampanya Kedung Ombo, koalisi nasional diantara LSM, sampai pada LBH atau Lembaga Bantuan Hukum mengaplikasikan pendekatan struktural yang secara sistematis melawan kebijakan rezim (Boudreau, 2004: 10).

Lembaga tersebut, merupakan bagian dari NGO (*Non Governmental Organization*). Seperti yang ditulis M. Dawam Rahardjo dalam majalah *Tempo* edisi 8 Februari 1992, LSM atau NGO memang memainkan peran kritikal, baginya, negara atau pemerintahan yang sudah matang, harus

memiliki LSM dan NGO. Pada dasarnya, Pemerintah membutuhkan oposisi, seperti “musuh dalam ping-pong”, sehingga NGO dan pemerintah bisa meningkatkan perkembangannya masing-masing (dalam Aspinall, 2006: 86).

Pertengahan Mei 1998, tepatnya 12 Mei 1998, empat mahasiswa Trisakti, Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hertanto, dan Hendrawan Sie meninggal akibat penembakan yang dilakukan oknum aparat keamanan pada saat itu. Walaupun gugurnya mereka telah memicu aksi massa yang lebih besar, hingga mengakibatkan rezim Soeharto runtuh, tetapi mahasiswa sekarang, masih memperingati tragedi tersebut dan terus memperingati para pemerintah, jika mereka tidak akan pernah lupa dan meminta pemerintah menegakkan keadilan (Diunduh dari Tempo.co, 16 Mei 2014).

Tidak hanya penembakan saja, orang hilang pada 1998 juga menjadi fokus para NGO. Kontras atau Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan lahir dengan dipimpin oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan beberapa NGO lainnya (Aspinall, 2006: 230) . Tercatat pada 1998, 13 aktivis Orde Baru telah dihilangkan secara paksa akibat perjuangan mereka dalam melawan tiran dan menuntut perubahan.

16 tahun era reformasi telah bergulir, walau Presiden SBY telah memberikan mereka – empat mahasiswa yang gugur – dengan Bintang Jasa Pratama sebagai Tanda Kehormatan melalui SK presiden Nomor 057/TK/tahun 2005 tertanggal 9 Agustus 2005, Kontras tetap “mewariskan” aksi-aksi

kritis perlakuan sampai sekarang (Tempo.co dan Kontras.org, diunduh 16 Mei 2014).

Contohnya adalah Aksi Kamisan, aksi berdiri diam dan membisu ini, merupakan cara para aktivis, dan keluarga korban, untuk menyuarakan kritik mereka, agar pemerintah lebih berpihak pada penegakan HAM. Terinspirasi oleh "Mothers of the Plaza de Mayo" yang dilakukan tiap Selasa, Kamisan terus dilakukan setiap Kamis, sampai sekarang, supaya keadilan bisa ditegakkan (Kontras.org, diunduh pada 16 Mei 2014).

Perlakuan sipil di Indonesia juga selalu terkait dengan tindakan represif aparat, Haris Azhar, Koordinator Kontras mengatakan, reformasi birokrasi Polri dinilai belum berjalan optimal, sehingga hal tersebut menjadi tanda ketidakberesan negara (pontianak.tribunnews.com, diunduh pada 7 Juni 2014).

Kepolisian belum mampu mendekatkan diri pada masyarakat, slogan yang bertuliskan "Melindungi dan Melayani" sering menjadi bahan cibiran dengan menambahkan kata "Siapa?" dibelakangnya. Kepolisian seharusnya menjadi agen perubahan dalam era reformasi, namun kenyataannya mereka malah melenggangkan praktik represif Orde Baru, sampai sekarang (pontianak.tribunnews.com, diunduh pada 7 Juni 2014).

Haris mengatakan bahwa berdasarkan data tahun lalu, kasus kekerasan aparat telah meningkat sebanyak 100 persen. Pada 2012, Kontras masih mengumpulkan data, namun ada indikasi jika kasus kekerasan oleh aparat mengalami peningkatan. Kontras juga menyuarakan kritiknya terkait tindakan

represif aparat kepolisian terhadap kaum buruh SERBUK (Serikat Buruh Kerakyatan) dan FSPMI Kab. Bekasi yang terjadi saat mereka sedang melakukan aksi mogok, pada September 2013.

Kontras yang menganggap hal tersebut bertentangan dengan jaminan kebebasan berekspresi, seperti hak untuk mogok, hak berpendapat, dan hak untuk berorganisasi, akhirnya meminta aparat kepolisian untuk, bersikap profesional dan kooperatif; menindak dengan tegas anggota-anggotanya yang bertindak semena-mena; Kontras juga mendesak agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti Laporan Propam No: STPL/217/IX/2013/Yanduan terkait dengan tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan oleh Polres Karawang dan Polsek Teluk Jambe, dalam penanganan aksi unjuk rasa (kontras.org, diunduh pada 7 Juni 2014).

Jejak aparat juga sangat tercium jelas dalam aksi perlawanan sipil di Kulonprogo, para petani lahan pantai yang menggantungkan kehidupan pada lahan pertanian untuk mananam palawija dan buah-buahan, harus terancam akibat munculnya pertambangan pasir besi.

Menjadi komoditas berharga, pasir besi Kulonprogo ternyata tidak hanya mengandung titanium, tetapi juga vanadium. Bahan tersebut dapat diproduksi menjadi logam anti karat dan peralatan berkecepatan tinggi.

Hal itulah yang membuat Bupati Kulonprogo periode 2001-2006, Toyo Santoso Dipo telah menerbitkan izin Kuasa Pertambangan untuk PT Jogja Magasa Mining (JMM). PT JMM adalah perusahaan yang didirikan keluarga keraton yaitu BRMH Hario Seno, GBPH Joyokusumo, dan GKR Pembayun.

Berdasarkan cerita dari Anugerah Perkasa yang muncul di Jurnal FKMA (Forum Komunikasi Masyarakat Agraris) edisi Mei 2014, insiden bermula saat tujuh pekerja PT Jogja Magasa Iron baru saja pulang dari kantor melewati jalan Gupit, Desa Karangsewu, Kulonprogo. Perjalanan mereka harus diberhentikan oleh warga lokal yang meminta mereka untuk berhenti bekerja di perusahaan pertambangan pasir besi.

Tukijo, salah satu petani Karangsewu juga meminta Basroni, salah satu karyawan PT JMI untuk menandatangani surat pernyataan, yang sejalan dengan permintaan warga. Akibat hal ini, akhirnya Tukijo harus menjadi target operasi kepolisian sebulan kemudian.

Tukijo dibawa paksa oleh aparat kepolisian menuju ke Markas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tukijo diperiksa dan akhirnya didakwa karena merampas kemerdekaan orang lain – para karyawan pertambangan pasir besi, akhirnya Tukijo dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Wates (aksi Kulonprogo ini disadur dari artikel Anugerah Perkasa dengan judul *Jejak Hitam Keraton Di Kulonprogo*, Mei 2014).

### **2.3.6 Perlawanan Sipil pada Orde Baru**

Aksi massa yang terjadi di Indonesia pada 1998, muncul karena dipicu oleh kebijakan orde baru yang represif, militeristik, dan korup. Kebijakan tersebut secara praktis membuat pemerintah Orde Baru memegang kontrol

atas semuanya, dari atas ke bawah, hulu ke hilir. Masa tersebut adalah masa dimana “*absolute power, corrupt absolutely*”.

Menurut buku David Jenkins (2010) dengan judul *Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, Jenderal Widodo pada 1981 pernah mengakui jika peran pemerintah memang terlalu kuat.

“Pemerintah mengontrol segalanya, dari bawah sampai ke tingkat paling atas. Pertanyaannya ialah apakah kita akan meneruskan seperti ini di masa datang, atau kita akan membuat perbaikan. Kita harus mengurangi keterlibatan ABRI, memberikan kesempatan lebih banyak kepada rakyat,” ujar Jenderal Widodo (Dalam Jenkins, 2010: 153).

Selain ABRI, Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret juga menjadi kunci agar Soeharto dan kroninya bisa melenggang ke pucuk pimpinan. Dalam buku *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya* (1989), Soeharto menganggap Supersemar adalah awal dari perjuangan Orde Baru, melalui lahirnya Supersemar, Soeharto membubarkan PKI dan memberangus para anggotanya sampai ke akar-akar (Dwipayana, 1989: 172).

Prof. Dr. Saskia E. Wieringa dari University of Amsterdam menganggap jika Orde Baru telah meruntuhkan sendi-sendi pemikiran masyarakat Indonesia dengan cara kekerasan dan manipulasi informasi untuk memusuhi komunis.

Melalui kata pengantar yang dia tulis dalam buku *Suara Perempuan Korban Tragedi '65* (2007), Wieringa bercerita melalui sudut pandang Yanti, seorang perempuan Gerwani yang ingin bercerita kepada keluarga jenderal-

jenderal yang terbunuh di Lubang Buaya pada 1965 jika cerita-cerita tentang bagaimana cara jenderal itu mati, tidak benar adanya (Wieringa dalam Nadia, 2007: 7).

Dengan menggunakan perspektif model keibuan, Wieringa melihat jika peran Gerwani sebagai sayap revolusioner telah menciptakan model keibuan yang militan. Model tersebut mengajak para ibu untuk bertanggungjawab terhadap pendidikan moral anak-anak mereka, agar mereka bisa menjadi anggota yang berguna bagi “Keluarga Manipol yang sejati”. Keluarga ini dimaksudkan untuk menjadi benteng yang kokoh terhadap pengaruh imperialisme dan bisa membantu Soekarno dalam mencapai tujuan-tujuan revolusionernya (Wieringa dalam Nadia, 2007: 10).

Gerwani telah mengembangkan model perempuan yang lebih mirip dengan tokoh Srikandi, istri Arjuna yang juga merupakan pejuang. Kartini juga menjadi pahlawan mereka karena bisa berbicara lantang tentang kejahatan poligami, imperialisme, dan pendidikan merata bagi kaum perempuan.

Gerwani memang menganggap jika peran pertama dan utama perempuan adalah sebagai ibu, tetapi bagi Gerwani model keibuan militan adalah menggabungkan fungsi keibuan dengan aktivisme politik, hal ini bertentangan dengan kebenaran konservatif yang diakui oleh masyarakat (Wieringa dalam Nadia, 2007: 11).

Selepas kup 1 Oktober 1965 dan Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan, Orde Baru mulai melancarkan kampanye manipulatif dan negatif,

untuk “mempersentankan” komunis. Dalam hal ini Gerwani telah dituduh menari seksual dengan telanjang, memotong-motong penis jenderal-jenderal dan mencungkil mata (Wieringa dalam Nadia, 2007: 14).

Surat kabar militer juga menyebarkan berita dengan isi yang sama, mengenai tarian dan pemotongan penis tersebut. Saksi-saksi dimunculkan, foto-foto dibuat dan dipertontonkan. Militer menyiarkan hal tersebut dengan cara menyiksa para wanita Gerwani untuk berkata “ya” agar mendukung pernyataan mereka (Wieringa dalam Nadia, 2007: 15).

Lebih parahnya lagi tokoh-tokoh pimpinan islam juga ikut dalam menyatakan kesetujuannya untuk “mempersetankan” komunis. Muhammadiyah menyatakan jika “membasmi Gestapu” merupakan tugas utama yang wajib. Hal ini mereka sebut sebagai perang suci yang kemudian dapat menghalalkan pembunuhan sebagai “kehendak Allah” (Wieringa dalam Nadia, 2007: 16).

Manipulasi informasi tersebut merupakan sebuah kesengajaan, untuk mengguncang kesadaran beragama dan budaya kolektif bangsa Indonesia. Dengan hal itulah Soeharto dapat membangun jalan menuju kekuasaan, secara eksplisit Soeharto juga menyatakan jika Indonesia memerlukan transisi mental karena popularitas Soekarno dan PKI yang besar tidak akan mudah ditumpaskan (Wieringa dalam Nadia, 2007: 17).

Suasana kacau sengaja diciptakan dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat, yang sangat terguncang oleh ketegangan politik dan sosial pada saat itu. Kekacauan ini akhirnya muncul sebagai rasa ketakutan terhadap

kekuatan seksual perempuan yang tidak terkendali (Wieringa dalam Nadia, 2007: 17).

Soeharto melalui Orde Baru-nya telah melegitimasi kekuasaan melalui kontrol terhadap kaum wanitanya sendiri, sampai kepada kaum wanita komunis yang “biadab” dan kaum laki-laki “musuh” yang digambarkan telah bertanggungjawab atas tingkah-laku “biadab” dari wanita komunis mereka (Wieringa dalam Nadia, 2007: 20).

Pasca Gerakan 30 September dan penumpasan habis anggota PKI (1965-1966), kumpulan perwira AD yang ingin lepas dari bayang-bayang Orde Lama mulai membentuk doktrin militer baru. Mereka mengumpulkan dalil-dalil yang akan menjadi dasar dari doktrin pemerintah Orde Baru. Penekanan terhadap dwifungsi ABRI terus dikembangkan, termasuk dalam seminar AD di Bandung pada 1966. Bagi para perwira AD pada era tersebut, peran ABRI tidak hanya mengemban tugas dan tanggung jawab diluar bidang militer, tetapi juga memperluas dan memperkuat kegiatan-kegiatan tersebut. Bagi mereka, tidak ada pilihan lain bagi AD untuk memenuhi harapan rakyat dan membentuk pemerintah yang kuat, progresif, dan bertanggungjawab (Jenkins, 2010: 5).

Maka dari itu, melalui doktrin dwifungsi, Orde Baru coba mengkonsolidasi kekuatan militer dan mengontrol kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Seperti yang peneliti paparkan sebelumnya, dengan doktrin dwifungsi dan Supersemar, pemerintah Orde Baru melegitimasi fungsi sosio-politis dari ABRI, juga peran pertahanan dan kekuatan. Melalui

militär, secara terselubung mereka membentuk teritorial struktur untuk mengatur pemerintahan sipil sampai ke tahap desa (Aspinall, 2005: 22).

Keadaan tersebut menjadikan peran ABRI sangat tersentralisasi, hingga lingkaran “inti” di sekitar Soeharto yang diisi oleh para perwira terdekat, sangat mendominasi dan sarat akan penyalahgunaan wewenang. Soeharto bahkan melebihi *primus inter pares* (yang terunggul diantara sesama) diantara jajaran kolegial AD, orang-orangnya berada diberbagai tempat, mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai Panglima Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang berkuasa dalam pemulihan dan ketertiban (Jenkins: 2010: 17).

Sejak 1970 rezim Orde Baru bergulir, muncul sebutan untuk para masyarakat terbuang yang mengambil jalan berlawanan dengan rezim Orde Baru. Sebutan *barisan sakit hati*, digunakan oleh rezim tersebut untuk merendahkan orang-orang penting Indonesia, yang mulai mengkritisi Orde Baru, khususnya bagi mereka yang mendukung Orde Baru di masa-masa awal (Aspinall, 2005: 50).

Sebutan *barisan sakit hati*, mengawali akumulasi kekesalan rakyat Indonesia. Walaupun sebutan tersebut terkesan tidak adil, tetapi hal itu menciptakan garis tipis yang memisahkan pemerintahan dengan kritik-kritik yang bermunculan, menyebabkan fase oposisi menjadi berkembang.

Detlev Peukert (1991, dalam Aspinall, 2005: 6), menjabarkan pola perilaku oposisi dalam rezim non-demokratis, menurutnya pola tersebut

berawal dari “perilaku non-konformis”, “penolakan”, “protes”, dan “perlawanan”.

Pemerintah juga membentuk Golkar (Golongan Karya) sebagai mesin politik mereka. Mereka tetap mempertahankan infrastruktur negara, seperti partai, proses legislasi, dan pemilihan umum, tetapi mereka mengkombinasikannya dengan intervensi, manipulasi, dan pemaksaan. Golkar menjadi penghubung, juga kail untuk mengikat para pemerintah sipil untuk menciptakan “*monoloyalty*”, keadaan dimana mereka harus tunduk pada partai (Golkar), sehingga Soeharto dapat terus melenggang sebagai presiden selama 32 tahun, dengan rataan suara diatas 50% tiap pemilu diadakan (Aspinall, 2005: 22).

Kebijakan pemberangusan hak politik juga direalisasikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik, menjadi hanya dua partai (nasionalis dan agama), serta satu Golongan Karya (Dpr.go.id, diunduh pada 16 Mei 2014).

Liddle berpendapat, rancangan undang-undang tersebut hanya bertujuan untuk membatasi kemampuan partai lain untuk bersaing dengan Golkar, mencegah pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota partai selain Golkar, membatasi ideologi partai hanya pada Pancasila dan UUD 1945, serta melarang organisasi partai beroperasi di wilayah yang lebih kecil dari kabupaten (Dalam Jenkins, 2010: 52).

Stabilitas politik, kemajuan ekonomi, sikap baik terhadap semua golongan kecuali komunis, serta percepatan modernisasi, telah membuat pemerintah saat itu dengan Golkar sebagai mesin politiknya, tak tergoyahkan. Golkar yang secara implisit membawa “perubahan” dengan menghancurkan PKI dan menurunkan Soekarno, telah membangkitkan watak tradisionalisme masyarakat Indonesia, yaitu pasrah mengikuti harapan “pihak berkuasa” dengan mengetahui jika mereka tidak terlalu buruk, ketimbang memilih sesuatu yang tidak mereka kenal (Hindley dalam Jenkins, 2010: 50).

Orde baru tidak hanya sukses mengebiri hak-hak politik masyarakat, mereka juga berhasil “memenjarakan” logika masyarakat dengan menjadikan PKI sebagai “virus” untuk membelenggu sikap kritis dan semangat perlawanan. Selama 32 tahun kita “dibius” oleh pembangunan semu, dan selama itu pula Soeharto telah menggelapkan 35 miliar dolar AS uang rakyat Indonesia (Hukumonline.com dan Kontras.org, diunduh pada 17 Mei 2014).

Arus modal asing juga dijadikan “lahan” dalam mencari keuntungan pada era Orde Baru, hal itu ditandai dengan munculnya Repelita I pada 1 April 1969 yang menjadi tonggak awal masuknya arus modal asing ke Indonesia. Menurut Soeharto dalam otobiografinya, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Repelita I ini digunakan sebagai rencana pembangunan nasional jangka panjang, yang disusun oleh Bappenas dan diketuai oleh Prof. Dr. Widjojo Nitisastro (Dwipayana, 1989: 238).

Tetapi untuk mempercepat rencana tersebut, Soeharto menyadari jika kemampuan Indonesia dalam membangun sangatlah terbatas. Maka dari itu,

Soeharto memanfaatkan pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah, serta angsuran dimulai setelah 10-15 tahun. Masuknya arus modal asing, menjadikan Indonesia sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan asing (Dwipayana, 1989: 239).

Buntutnya, peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 akhirnya meletus. Para massa yang menolak keras masuknya modal asing melakukan protes bertepatan dengan datangnya Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta. Mahasiswa menyambut kedatangan Tanaka dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma ([politik.lipi.go.id](http://politik.lipi.go.id), diunduh pada 7 Juni 2014).

Mahasiswa secara terbuka memang sudah menyatakan penentangan akan modal asing, mereka juga menolak kunjungan Tanaka ke Indonesia, yang direncanakan akan bertemu dengan Soeharto untuk membahas kerja sama bilateral. Hariman Siregar, Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia mengatakan, “yang terjadi pada 1974 dan seterusnya ini hanyalah pengulangan sejarah sebelum kemerdekaan, kita dijajah Jepang.” Ujarnya saat membacakan “Pidato Pernyataan Diri Mahasiswa” (Tempo, 2014: 74).

Michael H. Anderson melalui bukunya, *Madison Avenue in Asia: Politics and Transnational Advertising* mengemukakan, aksi protes mahasiswa pada saat itu adalah antiasing, terutama Jepang; antibirokrasi, terutama ditujukan bagi para teknokrat berpendidikan Barat yang mendorong pemerintah untuk lebih percaya investasi asing; dan antimiliter, terutama terhadap jenderal-jenderal yang dicurigai banyak diuntungkan dari perjanjian

bisnis dengan orang-orang tionghoa dan asing (dalam Historia.co.id, diunduh 7 Juni 2014).

Menurut Prof Aiko Kurasawa, sejak akhir 1960-an, banyak perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia tanpa sepengetahuan negara ini. Saat itu studi Asia Tenggara sama sekali belum berkembang di Jepang, baru setelah peristiwa Malari meletus, Jepang lebih memandang Asia Tenggara (politik.lipi.go.id, diunduh pada 7 Juni 2014).

Dalam peristiwa Malari ini, sedikitnya 11 orang tewas dan 300 lainnya luka-luka, 807 mobil dan 187 sepeda motor juga menjadi sasaran amuk massa, dan 144 bangunan rusak. Toko-toko perhiasan pun dijarah, sebanyak 160 kg emas raib, ujungnya, 775 orang ditahan menyusul aksi pemerintah dalam memadamkan peristiwa tersebut (historia.co.id, diunduh 7 Juni 2014).

Peristiwa Malari 1974 memang sangat mencoreng “kening” Soeharto, hal tersebut dikarenakan peristiwa ini terjadi didepan hidung tamu negara, yaitu Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Akibatnya, Soeharto menjalankan represi dengan lebih sistematis, dia sangat waspada terhadap semua orang/golongan, dan menerapkan sanksi tanpa ampun bagi pihak yang mengusik pemerintah. Dia juga sangat selektif dalam memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan kriteria “pernah jadi ajudan presiden” (politik.lipi.go.id, diunduh 7 Juni 2014).

Karenanya, peristiwa Malari 1974 dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru, peristiwa ini juga menjadi benih-benih perlawanan sipil yang lebih besar lagi.

Pemerintah Orde Baru juga menggunakan terminologi Pancasila sebagai dasar dan pedoman rakyat Indonesia, sehingga memunculkan sebutan-sebutan “subversif”, “komunis”, “ekstrim-kiri” dan “ekstrim-kanan” bagi mereka yang tidak mematuhi.

Menurut berita yang dilansir Mediaumat.com, pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU No 8 tahun 1985 mengenai pengaturan Pancasila sebagai anggaran dasar organisasi-organisasi kemasyarakatan. Melalui undang-undang tersebut, Soeharto mengebiri hak-hak politis ormas dengan tiga konsep penerapan Pancasila, yaitu: 1) Pribadi Pancasila; 2) Masyarakat Pancasila; 3) Negara Pancasila (mediaumat.com, diunduh pada 27 Mei 2014).

Orde Baru juga menunjukkan sikap antipati terhadap kalangan islam, dengan menjulukinya sebagai “ekstrim-kanan” dan menjuluki PKI sebagai “ekstrim-kiri”. Banyak sumber yang mengatakan, Soeharto melakukan hal tersebut karena takut akan ancaman kekuatan Islam terhadap kekuasaannya (mediaumat.com, diunduh pada 27 Mei 2014).

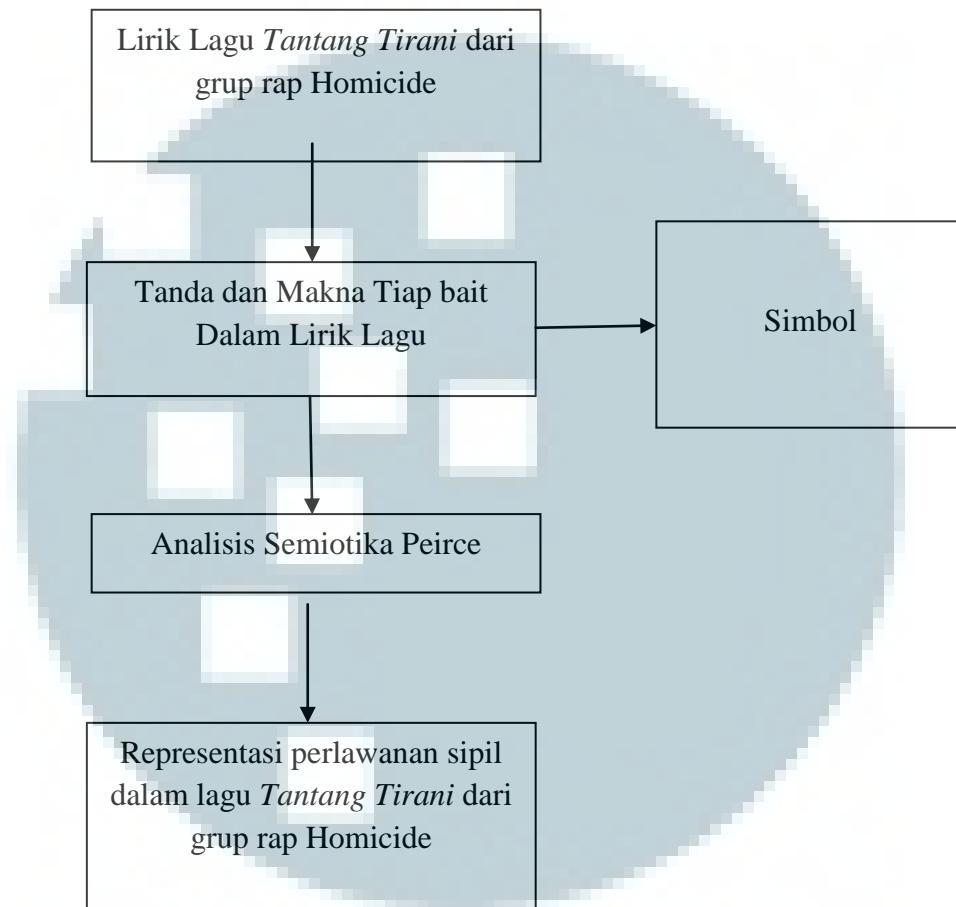
Akibat hal ini, banyak masyarakat yang ditangkap karena berseberangan dengan “Pancasila” versi pemerintah Orde Baru, mereka yang berseberangan banyak disebut sebagai “subversif”, “ekstrim-kiri”, dan “ekstrim-kanan”. Banyak korbananya, termasuk dari aktivis dakwah, salah satunya adalah Imaduddin Abdurrahim, yang ditangkap di ITB, Bandung karena ceramahnya dianggap subversif dan menentang Pancasila, tetapi dia dibebaskan karena tuduhannya tidak jelas (mediaumat.com, diunduh pada 27 Mei 2014).

Puncaknya, tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984 yang menewaskan puluhan orang terjadi karena mereka menuntut pembebasan empat rekan mereka, Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan M. Nur yang ditahan Kodim 0502 karena diduga membakar sepeda motor Babinsa (mediaumat.com dan tribunnews.com, diunduh pada 27 Mei 2014).

Komnas HAM melansir, ABRI dalam peristiwa Tanjung Priok memang terbukti telah melanggar peraturan hak asasi manusia, seperti pembunuhan secara kilat (*summary killing*), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), penyiksaan (*torture*), dan penghilangan orang secara paksa (*enforced or involuntary disappearance*) (tribunnews.com, diunduh pada 27 Mei 2014).

Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada rezim Orde Baru, memang membuat rezim tersebut sangat dekat dengan aksi kekerasan. Orde Baru telah mesentralisasikan kekuatan militer dalam struktur rezimnya dan meng-hegemoni kekuasaan melalui ideologi otoritarian. Peran represif aparat pada rezim Orde Baru juga menjadi modal penting untuk melenggangkan Soeharto dalam pucuk kepemimpinan selama tiga dekade (Aspinall, 2005: 2).

### 2.3.7 Kerangka Penelitian



UNN